

Pemprov DKI Pastikan Pasokan Gas Melon di Jakarta Aman

JAKARTA (IM) - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta, memastikan stok gas elpiji 3 kilogram atau gas melon menjelang dan hingga Natal serta Tahun Baru (Nataru) aman.

Kepala Bidang Energi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Edward Napitupulu mengungkapkan hingga akhir Desember 2021 masih tersedia stok gas 3 kilogram sebanyak 12.795.333 tabung.

Edward memastikan berdasarkan hasil monitoring di agen dan pangkalan yang dilakukan secara acak, harga gas 3 kilogram masih terbilang stabil.

Untuk di wilayah daratan Jakarta, harga gas melon dipatok sebesar Rp16 ribu. Sementara harga gas 3 kilogram di wilayah Kepulauan Seribu Selatan sebesar Rp18.500 dan Kepulauan Seribu Utara Rp19.500.

“Untuk harga di tingkat

pengecer bervariasi tergantung tingkat layanan pengecer dan lokasi dengan kisaran harga Rp 20 ribu - Rp 24 ribu,” ujar Edward, Selasa (21/12).

Edward mencatat untuk jumlah agen di seluruh wilayah DKI Jakarta yang siap mensuplai gas tiga kilogram ke masyarakat ada sebanyak 274.

Untuk pangkalan yang menjual gas 3 kilogram di seluruh wilayah DKI Jakarta ada sebanyak 3.904.

Selain itu, untuk menjamin tidak terjadinya kelangkaan gas 3 kilogram pada masa Nataru, Edward telah melakukan koordinasi dengan Pertamina dan pihak swasta.

“Kami juga ada pengawasan atau koordinasi dengan Pertamina dan Hiswana Migas untuk menyiapkan kuota apabila nanti terjadi kelangkaan tapi mereka menjamin masih ada kuota siap untuk memasok elpiji,” pungkasnya. ● yan

Sopir Bus Diingatkan Tidak Ambil Penumpang di Terminal Bayangan

JAKARTA (IM) - Para sopir bus antarkota antarprovinsi maupun antarkota dalam provinsi (AKAP atau AKDP) yang berangkat dari Terminal Kalideres diingatkan untuk tidak menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal bayangan pada natal dan tahun baru 2022.

Kepala Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Revi Zulkarnaen, menegaskan hal itu di Terminal Kalideres, Selasa (21/12), menyusul meningkatnya jumlah penumpang bus menjelang natal dan tahun baru 2022.

“Kepada para sopir bus, untuk mengarahkan penumpangnya naik dari dalam terminal Kalideres, agar para penumpang bisa diperiksa kesehatannya sebelum naik bus,” katanya.

Revi menjelaskan, penumpang diharuskan naik dari terminal resmi agar melewati pemeriksaan kesehatan oleh petugas. Pemeriksaan itu terdiri dari scan barcode PeduliLindungi hingga me-

nyerahkan surat keterangan negatif antigen.

Pihak terminal juga menyiapkan fasilitas tes antigen di lokasi jika penumpang tidak sempat melakukan pemeriksaan di tempat lain. “Kami bekerjasama dengan klinik Kimia Farma untuk melakukan pemeriksaan antigen yang berbayar,” kata dia.

Menurut Revi, dengan tertibnya penumpang naik dari dalam terminal, maka akan lebih menjamin keamanan penumpang dari penyebaran Covid-19. Revi juga mengimbau, pemilik perusahaan bus AKAP dan AKDP untuk turut menertibkan sopirnya dengan menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam terminal.

Pengelola Terminal Kalideres juga berkoordinasi dengan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat untuk menghapus terminal bayangan di Jakarta Barat.

“Sampai saat ini saya belum menerima laporan adanya aktivitas terminal bayangan,” jelas Revi. ● yan

Jakarta Sabet Penghargaan Sebagai Kota Ramah Sepeda se-Indonesia

JAKARTA (IM) - Membanggakan, Provinsi DKI Jakarta menyabet penghargaan sebagai Kota Ramah Sepeda se-Indonesia dari komunitas Bike to Work Community (B2W) di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (21/12).

Jakarta menjadi kota pertama yang mendapatkan penghargaan sebagai Kota Ramah Sepeda dengan kategori Kota Metropolitan.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghargaan tersebut akan dijadikan sebagai pendorong untuk dapat lebih berinovasi dalam mengambil kebijakan khususnya bagi pesepeda.

“Ini bukan kerja 1-2 tahun, ini adalah situasi yang sudah

kita jalani amat panjang yang kita teruskan, kita lempaskan dan Alhamdulillah Jakarta makin hari makin ramah untuk pesepeda,” ujar Anies dalam sambutannya.

Anies menambahkan, anugerah ini diberikan untuk warga Jakarta, instansi, swasta, komunitas dan perangkat pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai hasil kolaborasi.

Kolaborasi itulah yang akhirnya menghasilkan program-program kebijakan untuk memenuhi fasilitas yang dibutuhkan pesepeda.

“Setiap keberhasilan kita tidak berdiri sendiri, setiap keberhasilan adalah bagian dari kerja panjang, lintas waktu dan yang dikerjakan di Jakarta lintas komunitas,” ungkapnya.

Ke depan Anies menginginkan sepeda tidak hanya dipandang sebagai alat untuk berolahraga tapi juga sebagai alat transportasi.

“Kita iktiharakan serius agar pesepeda di Jakarta mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan itu tidak sesuatu yang sederhana untuk kota sekompleks Jakarta,” pungkaskan Anies. ● yan

PENGUMUMAN

PT BERSAMA SAWIT SEJAHTERA, berkedudukan di Kota Palembang - Sumatera Selatan (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan bahwa “Perseroan akan diambillah oleh pemegang saham baru, dengan cara mengambil saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 125 dan 127 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Palembang, 21 Desember 2021
Direksi
PT BERSAMA SAWIT SEJAHTERA

PERINGATAN DAN PENGUMUMAN MEREK DAGANG

Untuk dan atas nama Klien Kami EDINA NATHANIA selanjutnya disebut sebagai “PEMILIK MEREK TERDAFTAR” dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kantor konsultan hukum dan kekayaan intelektual Jekrinus & Co. selaku kuasa hukumnya yang beralamat di Karindra Building Lantai 2 No. 7, Jl. Palmerah Selatan No. 30A, RT.4/RW.2, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270, dengan ini memberitahukan kepada masyarakat, para pemilik toko offline, toko online, department store serta konsumen pada umumnya, hal-hal sebagai berikut:

1. PEMILIK MEREK TERDAFTAR adalah pemilik merek BMC Nomor terdaftar dengan Nomor ID/M00442917 dikelas 12 dengan jenis barang “Sepeda” di Indonesia

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa sebagai pemegang “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”, dan melalui Pengumuman ini PEMILIK MEREK TERDAFTAR melarang Pihak lain tanpa persetujuan PEMILIK MEREK TERDAFTAR menjual, melakukan produksi, mengimpor, menyediakan tempat untuk dijual atau menyerahkan yang menggunakan Merek Terdaftar (selanjutnya disebut “Kegiatan yang Dilarang”).

3. Bahwa berdasarkan point 2 (dua) diatas, Berdasarkan hal tersebut diatas, kami memberikan peringatan selama jangka waktu 7 hari dan merupakan peringatan terakhir, dari tanggal pengumuman ini (selanjutnya disebut “Jangka waktu”), segera mengakhiri kegiatan yang dilarang atas pemakaian merek pada point 2 diatas;

4. Apabila setelah jangka waktu tersebut, kami menemukan “Kegiatan yang dilarang” dilakukan oleh Toko offline, Toko online atau toko online yang menyediakan lapak penjualan Merek “BMC” untuk barang sepeda maka kami akan menempuh langkah-langkah hukum perdata dan/atau Pidana, terhadap Pihak-pihak, yang melakukan “Kegiatan yang dilarang” tersebut yang berdasarkan Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan hukuman Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Jakarta, 22 Desember 2021
KUASA HUKUM PEMILIK MEREK BMC
JEKRINIUS & Co.

Ttd

JEKRINIUS HASHOLAN SIRAIT, S.H., M.Kn, CPL

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



GUBERNUR DKI JAKARTA HADIRI PERAYAAN NATAL DI TAMAN FATAHILLAH

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) menghadiri perayaan Natal “Christmas in Jakarta” di Taman Fatahillah, Kota Tua, Jakarta, Senin (20/12) malam. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar acara “Christmas in Jakarta” dengan tema Harmony with History dalam rangka menyambut perayaan Natal 2021 dengan pertunjukan video mapping bernuansa Natal yang menyorot ke Gedung Museum Sejarah Jakarta.

Wagub Riza Klaim UMP 2022 Naik 5,1 Persen Disetujui Pengusaha

Wagub DKI Riza berharap unsur pengusaha dapat menerima keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menaikkan UMP 2022 sebesar 5,1 persen. Apabila perusahaan ingin maju dan sukses maka harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya. “Pengusaha tidak bisa tanpa buruh, lalu buruh tidak bisa tanpa pengusaha semua harus bersinergi,” ujarnya.

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengklaim kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen bukan kebijakan sepihak Pemprov DKI. Menurut Riza, Pemprov DKI sudah menggelar rapat dengan unsur pengusaha soal kenaikan ini.

“Waktu rapat sebelumnya sebetulnya pengusaha tidak keberatan naik sampai angka 5 persen, gitu. Makanya akhirnya Pemprov memutuskan ada kenaikan sampai 5,1 persen,” ujar Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (21/12).

Wagub DKI Riza berharap unsur pengusaha dapat menerima keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menaikkan UMP 2022 sebesar 5,1 persen. Sebab jika mengacu pada keputusan sebelumnya yang hanya naik 0,85 atau Rp38 ribu, bakal memberatkan unsur buruh.

“Kan tidak adil, tidak bijak. Berarti kan di bawah angka pertumbuhan ekonomi, di bawah angka inflasi,” kata Riza. Pemprov DKI juga mempersilakan para pengusaha menyampaikan keberatan terkait keputusan revisi kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1 persen (Revisi UMP) 2022 sebesar 5,1%. Revisi kenaikan UMP ini telah dibahas dalam rapat dengan Dewan Pengupahan dan pengusaha.

“Kalau nanti ada pengusaha yang keberatan silakan sampaikan kita bisa duduk, bisa diskusi,” ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Menurut Ariza, apabila perusahaan ingin maju dan sukses maka harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya.

“Pengusaha tidak bisa tanpa buruh, lalu buruh tidak bisa tanpa pengusaha semua harus bersinergi. Begitu juga pemerintah butuh kerja sama semua pihak, buruh, pengusaha dan dukungan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Kamar

Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi mempertanyakan dasar keputusan Gubernur Anies Baswedan merevisi UMP DKI 2022. Menurut dia, Anies mengubah UMP DKI 2022 tanpa melalui sidang Dewan Pengupahan.

“Kami harapkan bahwa keputusan yang diambil oleh Dewan Pengupahan seharusnya Pak Anies sudah bisa mengakomodir dan menyesuaikan itu,” kata dia saat dihubungi, Sabtu lalu.

Kadin DKI termasuk dalam anggota Dewan Pengupahan dalam merapatkan nilai UMP 2022. Diana menceritakan UMP DKI 2022 akan kembali direvisi.

Angka kenaikan UMP 5,1 persen, kata Pandapotan, belum final dan hingga saat ini belum ada kepastian hukum terkait revisi UMP itu. “Saya kemarin itu telepon (Kepala) Dinas Tenaga Kerja, malah akan ada revisi (UMP) lagi,” ujar Pandapotan saat ditemui dalam acara laporan satu tahun Fraksi PDI-P di M Bloc, Jakarta Selatan, Selasa (21/12).

Karena kenaikan UMP 5,1 persen tidak memiliki kepastian hukum, Pandapotan menilai, revisi UMP yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hanya menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Kenapa begitu? Karena itu akan menciptakan suasana tidak kondusif antara pengusaha dengan buruh,” ujar dia. Politikus PDI-P ini mengatakan, Komisi B akan memanggil para pihak, termasuk Disnakertrans DKI Jakarta untuk menjelaskan revisi UMP yang menimbulkan kegaduhan tersebut.

“Jadi nanti kami Komisi B bakal panggil lagi untuk tanya dasar revisinya,” kata Pandapotan. ● yan

Vaksinasi Covid-19 Usia 6-11 Tahun, Pemkot Bekasi Targetkan 296.121 Anak

KOTA BEKASI (IM) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan Kota Bekasi menargetkan sebanyak 296.121 anak usia 6-11 tahun untuk wajib vaksin Covid-19.

Dalam rilis Humas Pemkot Bekasi, Senin(20/12) malam disebut, jumlah itu didapat dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi. Sedangkan target dari Kementerian Kesehatan adalah sebanyak 237.310 anak.

Pemkot Bekasi mengupayakan percepatan vaksinasi usia 6-11 tahun selesai dalam kurang waktu 30 hari. Kota Bekasi sudah ditetapkan oleh Kemenkes menjadi salah satu kota yang dapat melaksanakan vaksinasi anak tahap 1 berdasarkan surat Nomor SR.01.01/4/3309/2021 tanggal 13 Desember 2021.

Lokasi pelaksanaan vaksinasi anak, sebut rilis itu, yaitu di SD di masing-masing kelurahan atau kecamatan. Selain di sekolah, juga bisa dilakukan di semua puskesmas terdekat.

Meski begitu, program vaksinasi anak masih menghadapi beberapa kendala seperti orang tua yang belum mengizinkan putra-putrinya untuk vaksinasi Covid-19.

Selain itu, jadwal vaksinasi Covid-19 juga berdekatan dengan jadwal vaksinasi BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah).

Ditambah lagi jadwal vaksinasi yang bersamaan dengan libur sekolah sehingga sulit mengumpulkan murid di sekolah. ● mdl

Plt. Bupati Dampingi Wagub Jabar Studi Banding Program Penurunan Stunting

BALI (IM) - Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, bersama Wakil Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat mendampingi Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, melakukan studi banding ke Pemerintah Provinsi Bali terkait program percepatan penurunan angka kasus gizi buruk atau stunting. Kegiatan tersebut bertempat di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/12).

Plt. Bupati dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Senin (20/12) malam menyampaikan, kegiatan studi banding itu dilakukan karena angka prevalensi stunting di Provinsi Bali termasuk masih rendah secara nasional, yakni sekitar 6% pada tahun 2020.

“Hari ini kita melakukan studi banding dengan Pemprov Bali, karena Bali ini termasuk daerah yang berhasil



menekan angka stuntingnya,” ucapnya.

Ya menjelaskan bahwa, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah yang masuk dalam program percepatan penurunan stunting secara terpadu. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Bekasi masih mengalami kendala dalam menekan angka prevalensi stunting.

“Memang di Kabupaten Bekasi kami masih mengalami kendala. Kita salah satu Kabupaten yang masuk dalam

program percepatan penurunan stunting secara terpadu,” jelasnya.

Setelah dilakukan pembahasan mengenai program penurunan angka prevalensi stunting di Provinsi Bali, dirinya menyampaikan akan

Antrean Karantina Membeludak, Wagub Riza Siap Berkolaborasi

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan siap membantu menanganai persoalan membeludaknya masyarakat yang harus karantina usai pulang dari luar negeri.

Namun, anggota Dewan Pengupahan dari unsur pekerja mengusulkan agar nilai UMP pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Namun, anggota Dewan Pengupahan dari unsur pekerja mengusulkan agar nilai UMP dinaikkan lagi sekitar Rp 20 ribu menjadi Rp 4.473.845. Anies Baswedan lantas melayangkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah agar meninjau kembali formula penetapan UMP.

Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga mengaku

mendapat kabar dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta bahwa kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2022 akan kembali direvisi.

Angka kenaikan UMP 5,1 persen, kata Pandapotan, belum final dan hingga saat ini belum ada kepastian hukum terkait revisi UMP itu. “Saya kemarin itu telepon (Kepala) Dinas Tenaga Kerja, malah akan ada revisi (UMP) lagi,” ujar Pandapotan saat ditemui dalam acara laporan satu tahun Fraksi PDI-P di M Bloc, Jakarta Selatan, Selasa (21/12).

Karena kenaikan UMP 5,1 persen tidak memiliki kepastian hukum, Pandapotan menilai, revisi UMP yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hanya menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Kenapa begitu? Karena itu akan menciptakan suasana tidak kondusif antara pengusaha dengan buruh,” ujar dia. Politikus PDI-P ini mengatakan, Komisi B akan memanggil para pihak, termasuk Disnakertrans DKI Jakarta untuk menjelaskan revisi UMP yang menimbulkan kegaduhan tersebut.

“Jadi nanti kami Komisi B bakal panggil lagi untuk tanya dasar revisinya,” kata Pandapotan. ● yan

Komandan Satgas Covid-19 Bandara Soekarno-Hatta, Kolonel Agus Listiyono membantukan adanya penumpukan penumpang itu. Peristiwa itu, kata Agus, terjadi sepekan yang lalu.

Kini para penumpang yang ada dalam video tersebut sudah dalam karantina di Rusun Nagrak, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

“Penumpukan itu terjadi karena ada beberapa faktor. Di antaranya adalah Wisma Nagrak pada Sabtu pagi belum siap menerima penumpang yang harus masuk karantina,” kata Agus saat dihubungi, Senin (20/12).

Menurut Agus, saat itu Rusun Nagrak belum siap dari sisi logistik. Akibatnya para penumpang yang harusnya masuk ke karantina di Rusun Nagrak itu akhirnya tertunda.

Para penumpang itu tak bisa diarahkan untuk karantina di Wisma Atlet lantaran di lokasi itu kini tengah lockdown karena ada pasien Omicron.

Agus menyebut penumpukan itu masuk Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat (10/12) tengah malam. Penumpukan terjadi lantaran ada penumpang lagi yang tiba pada Sabtu dini hari, (11/12). “Mereka baru beranjak dari bandara menuju tempat karantina pada Sabtu siang,” kata Agus. ● yan